
PEMANFAATAN DAN PERBURUAN GAJAH DI PERKEBUNAN SUMATRA TIMUR PADA AWAL ABAD XX

Suriani

Prodi Sejarah Peradaban Islam,
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
suriani@uinbukittinggi.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menarasikan hadirnya gajah dalam sejarah perkebunan Sumatra Timur dalam proses pembukaannya dan pembangunan infrastruktur. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan sumber primer berupa foto-foto pemanfaatan dan perburuan gajah di Sumatra Timur awal abad XX, arsip perkebunan Sumatra Timur sejak pembukaannya hingga perkembangannya awal abad XX, koran serta Staatsblad tahun 1924 dan 1931. Gajah memiliki peran penting dalam proses pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur di perkebunan Sumatra Timur, akan tetapi pada dekade kedua abad XX, perburuan terhadap gajah tetap dilakukan. Saat itu gajah diperlukan untuk pembangunan sekaligus untuk bersenang-senang dalam bentuk perburuan. Pemerintah Kolonial mengeluarkan undang-undang perburuan dan perlindungan hewan liar sebagai cara meminimalisirnya. Berdasarkan fakta tersebut terlihat bahwa dalam sejarah perkebunan Sumatra Timur bukan hanya ada narasi kapitalisme, kuli ataupun sejarah sosial yang membahas segregasi masyarakat, tetapi terdapat pula narasi tentang sejarah lingkungan yang mengekspos perubahan lanskap Sumatra Timur dan eksploitasi terhadap gajah.

Kata kunci: *gajah; pemanfaatan; perburuan; perkebunan Sumatra Timur*

ELEPHANT UTILIZATION AND HUNTING IN EAST SUMATRA PLANTATIONS IN THE EARLY XX CENTURY

Abstract

This paper aims to narrate the presence of elephants in the history of plantations in East Sumatra in the process of opening and building infrastructure. It used historical method with primary sources the photographs of the use and hunting of elephants in East Sumatra in the early 20th century, East Sumatra plantation archives from their opening until their development in the early 20th century, newspapers and the Staatsblad of 1924 and 1931. Elephants played an important role in the the process of land clearing and infrastructure development in plantations in East Sumatra, but in the second decade of the XX century, hunting of elephants was still carried out. At that time elephants were needed for development as well as for fun in the form of hunting. The Colonial Government passed laws on hunting and protecting wild animals to minimize them. Based on these facts, in the history of plantations in East Sumatra there are not only narratives of capitalism, coolies or social history that discuss social segregation, but there are also narratives about environmental history that expose changes in the landscape of East Sumatra and the exploitation of elephants.

Keywords: *elephant; East Sumatra plantation; hunting; utilization*

Naskah masuk: 30-08-2022; Revisi akhir: 12-05-2023; Disetujui terbit: 15-05-2023

I. PENDAHULUAN

Sumatra Timur pada awal abad XX dikenal sebagai “*Parijs van Sumatra*” karena infrastruktur kotanya yang modern. Terdapat bangunan-bangunan megah bergaya Eropa serta tersedianya fasilitas umum modern seperti hotel, bank, dan kantor pos. Situasi ini begitu kontras dari abad sebelumnya yang masih dipenuhi rimba raya dengan hutan-hutan purba menyebar dari pegunungan hingga pesisir. Perubahan ini terjadi karena pembukaan perkebunan tembakau yang mampu mengubah wajah rimba Sumatra Timur menjadi wilayah modern dalam waktu singkat. Menurut Karl J. Pelzer tidak ada wilayah yang sedemikian cepat berkembang, berubah, dan begitu merusak selain pembukaan perkebunan yang terjadi di Sumatra Timur pada akhir abad XIX dan awal abad XX (Pelzer, 1985).

Pembukaan perkebunan tembakau dimulai pada paruh kedua abad XIX dengan melibatkan pengusaha dan investor asing yang dipelopori oleh J. Nienhuys (Breman, 1997). Mereka membuat kesepakatan dengan penguasa-penguasa lokal Sumatra Timur untuk mendapatkan hak konsesi tanah untuk dijadikan lahan perkebunan (Pelzer, 1985). Dalam prosesnya, pembukaan lahan perkebunan membutuhkan tenaga yang besar karena lahan masih berbentuk hutan purba yang penuh dengan pohon-pohon besar dan tinggi serta rawa-rawa, hutan bakau, dan semak belukar (Volker, 1928).

Para tuan kebun mendatangkan banyak tenaga kerja baru dari luar Sumatra Timur, seperti Jawa, Cina dan India. Hal ini disebabkan jumlah penduduk tidak sebanding dengan luasnya lahan Sumatra Timur. Pada pertengahan abad XIX, jumlah penduduk Sumatra Timur hanya berkisar 100.000 orang (Reid, 2011). Jumlah tersebut meningkat drastis pada akhir abad XIX ketika perkebunan mulai dibuka. Selain jumlah masyarakat lokal yang sedikit, mendatangkan para pekerja dari luar Sumatra Timur juga memiliki alasan lain. Pada masa tersebut terbangun citra yang kurang baik terhadap masyarakat pribumi, yaitu penduduk asli dikenal malas (Melayu) dan bodoh (Batak) (Nienhuys, 1903). Akan tetapi, ketersediaan penduduk sebagai tenaga kerja bukanlah satu-satunya faktor dalam pembukaan lahan perkebunan. Bagaimanapun juga konsesi tanah yang ada sangat luas sedangkan tenaga manusia maupun peralatan yang mendukung saat itu belum cukup memadai, sehingga diperlukan bantuan dari tenaga hewan. Tidak hanya kuda, kerbau, dan sapi, tenaga hewan yang sering digunakan adalah gajah. Gajah tersebut sebelumnya telah didomestikasi (Barua, 2017), baik yang berasal dari luar Sumatra Timur maupun gajah asli yang terdapat di Sumatra Timur.

Sejak dahulu gajah ikut berperan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam proses masuknya Islam ke Sumatra Timur, gajah menjadi alat transportasi yang dipakai oleh para pedagang dari Aceh (Clarence-Smith, 2004), termasuk sebagai tunggangan armada perang Kerajaan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda. Gajah pun menjadi bagian upaya diplomasi terkait hubungan dagang dan politik kerajaan di wilayah Sumatra.

Bagi kepentingan ekonomi dan praktis lainnya gajah berperan sebagai moda transportasi. Pada masa kolonial, pemanfaatan gajah masih menjadi bagian dari kegiatan militer. Gajah

adalah tank tradisional. Tubuh gajah yang besar dan tenaganya yang kuat dimanfaatkan sebagai armada militer dan alat angkutan. Sebagai alat angkut, gajah dengan tenang mampu membawa beban berat untuk melintasi daerah yang sulit dilalui. Setiap gajah dilatih dan diasuh secara khusus oleh seseorang yang disebut “pawang” (Boomgard 1997). Di periode yang sama, gajah-gajah liar justru menjadi perburuan bagi orang Eropa maupun oleh masyarakat pribumi. Apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya?

Banyak foto yang menunjukkan orang Eropa bersama masyarakat asli, dengan senjata di tangan mereka, duduk atau berdiri bangga di atas gajah-gajah yang sudah mati. Hal ini tidak hanya di Sumatra Timur, tetapi juga di beberapa kawasan habitat hidup gajah Sumatra, seperti Palembang, Kerinci, dan juga Bengkulu. Jhr.F.C. van Heurn menyebutkan bahwa pada 1929 jumlah populasi gajah menurun dari sekitar 10.000 ekor menjadi 3.000 ekor. Bahkan, jumlah tersebut menurun lagi setelah dilakukan pengumpulan data secara intensif, bahwa ditemukan tidak lebih dari 1.300 ekor gajah yang tersisa di wilayah Sumatra. Ia mengatakan bahwa eksistensi gajah berada dalam bahaya sehingga pada akhirnya gajah menjadi spesies yang dilindungi (Heurn, 1929). Penyebab utama penurunan jumlah populasi gajah di wilayah Sumatra dan Aceh adalah aktifitas perburuan yang dilakukan oleh pemburu, terutama orang Eropa dan pekerja perkebunan Sumatra Timur. Selain alasan senang-senang, mereka juga beralasan bahwa gajah sering datang ke wilayah perkebunan dan merusak lahan tanaman yang ada di perkebunan, sehingga perlu diburu dan dibunuh (Kuswanda et al., 2022).

Perlindungan terhadap gajah menjadi bagian dalam agenda besar *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming* (Masyarakat Hindia-Belanda untuk Perlindungan Alam) yang didirikan pada tahun 1912. Mereka kemudian mengusulkan beberapa peraturan perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan di seluruh wilayah Nusantara. *The Wildlife Protection and Game Ordinance* (Staatsblad, No. 234 tahun 1924) kemudian direvisi kembali pada tahun 1931 menjadi undang-undang perburuan terhadap hewan liar. Sejak saat itu, pemerintah kolonial Belanda melarang segala jenis perburuan terhadap gajah (Peter Boomgard, 1997). Akan tetapi, pemanfaatannya terhadap industri perkebunan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Gajah menjadi salah satu alat penting dalam pembukaan perkebunan di Sumatra Timur, selain kuli kontrak.

Kajian sejarah perkebunan di Sumatra Timur selama ini kerap berkutat pada persoalan ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya. Sangat sedikit kajian tersebut yang berkaitan dengan lingkungan. Devi Itawan salah satu dari sedikit itu yang mengkaji secara visual bagaimana perubahan lanskap Sumatra Timur dari hutan purba menjadi lahan-lahan perkebunan (Itawan, 2020). Meskipun begitu perubahan lanskap tersebut tidak memperlihatkan situasi fauna yang di dalamnya. Untuk melihat perburuan fauna bisa dilihat dalam karya Peter Boomgard, yakni harimau (khususnya harimau jawa) dan sebagian kecil gajah dan badak menjadi hewan yang paling diminati untuk diburu di era kolonial (Peter Boomgard, 2001). Pada awal abad ke-20 perburuan beralih pada orang utan yang bertujuan untuk komersil. Situasi ini justru menunjukkan kondisi krisis ketika berbagai fauna asli menjadi target perburuan (Minarchek, 2018), apapun jenisnya. Hal ini sejalan dengan peneliti yang sama

dalam mengkaji perburuan gajah di Sumatra Utara dan Aceh pada 1925 – 1940 (Minarchek, 2020) yang lebih fokus pada proses konservasi daripada eksploitasi pihak perkebunan.

Tulisan ini bertujuan untuk menarasikan hadirnya gajah dalam sejarah perkebunan Sumatra Timur yang akan menjadi pelengkap narasi sejarah lingkungan di wilayah perkebunan Sumatra Timur. Juga menambah sederetan fakta eksploitasi terhadap gajah yang dilakukan pada masa kolonial di Sumatra Timur. Tulisan ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Daliman, 2012). Tahapan heuristik yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber baik primer maupun sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini di beberapa tempat penyimpanan seperti perpustakaan digital Universitas Leiden dan lainnya.

Adapun sumber primer yang digunakan dalam artikel ini adalah foto-foto dan arsip serta laporan tentang pemanfaatan, perburuan, dan perlindungan terhadap gajah di Sumatra Timur pada periode awal abad XX di antaranya adalah *Staatsblaad* No. 234 tahun 1924 dan *Staatsblad* No. 133 tahun 1931 (Jachordonantie, 1931). Meskipun batasan waktu dalam penelitian ini adalah awal abad XX, namun dalam penarasian dimulai sejak paruh ke dua abad XX ketika perkebunan di Sumatera Timur pertama kali dibuka, sehingga sumber primer lainnya yang dipakai adalah catatan tentang perkebunan Sumatra Timur sejak awal pembukaannya dan juga beberapa laporan tahunan dari berbagai perusahaan perkebunan yang ada di Sumatra Timur. Surat kabar yang terbit pada awal abad XX juga dijadikan sebagai sumber karena berkembangnya perkebunan Sumatra Timur tidak terlepas dari pemberitaan yang ada di surat kabar, salah satunya adalah surat kabar *De Soematra Post* dan *De Telegraf*.

II. PEMBAHASAN

A. Pemanfaatan Gajah dalam Perkebunan

Nienhuys menyebutkan bahwa ketika pertama kali datang ke Sumatra Timur (Deli), alamnya masih dalam bentuk hutan dan semak belukar (Gambar 1). Hutan tersebut masih hutan perawan dan ada pula yang menyebutnya sebagai *oerbosch* (hutan purba) yang seakan belum pernah dijamah sama sekali. Hutan tersebut menutup hampir keseluruhan wilayah Sumatra Timur yang hanya menyisakan daerah pantai dan dihuni oleh sedikit orang Melayu. Pada akhirnya hutan-hutan tersebut dengan cepat berubah menjadi lahan perkebunan.

Pembukaan lahan secara besar-besaran dilakukan ketika komoditas tembakau berkembang pesat di Eropa di akhir abad IX dan awal abad XX. Hal ini menarik para pengusaha Eropa untuk berlomba-lomba ikut membuka perkebunan di Sumatra Timur. Pada dasawarsa kedua abad XX, perkebunan semakin meluas dengan berbagai tanaman tropika lain seperti karet dan sawit. Keuntungan luar biasa yang didapatkan berbanding lurus dengan penghancuran hutan-hutan purba menjadi perkebunan yang sangat luas. Sumatra Timur mendapat julukan *dollar land* (tanah dolar) hingga *wild west* (barat yang liar) karena yang punya andil mengubah dan berkuasa di Sumatra Timur pada dasarnya adalah kalangan pengusaha atau tuan kebun. Para tuan kebun di Deli menyebut diri mereka sebagai *Deliaan*

dan mengklaim bahwa merekalah yang paling berkontribusi dalam merobohkan hutan purba di Sumatra Timur dan mengubahnya menjadi jaringan kereta api, jalan raya, bangunan-bangunan perkantoran, dan kota di tengah-tengah hamparan perkebunan tembakau yang mereka bangun (“Uit Den Pionierstijd van Deli [From the Pioneer Time of Deli],” 1938).



Gambar 1. Hutan purba Sumatra

Sumber: Gedenkschrift Bij Gelegenheid Van Het Vijftigjarig Bestaan, 1869-1919 (Deli_Maatschappij, 1919)

Kehadiran industri perkebunan secara struktural dan sistemik membawa perubahan pada lanskap dan lingkungan Sumatra Timur. Hutan purba Sumatra Timur berubah menjadi lahan-lahan perkebunan (Itawan, 2020). Pelzer (1985) menyebutkan bahwa pada awal abad

XX, perusahaan perkebunan telah menguasai sekitar sepertiga lahan di Sumatra Timur. Pada 1939, jumlah dan luas lahan konsesi di wilayah Sumatera Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Luas Lahan Perkebunan Sumatra Timur tahun 1939

No	Perkebunan	Jumlah Konsesi	Luas Wilayah (Hektare)
1	Deli	62	142.605,95
2	Serdang	64	94.099,87
3	Langkat	93	287.433,27
4	Padang dan Bedagai	51	96.865,60
5	Simalungun dan Tanah Karo	81	144.484,13
6	Asahan	57	103.259,17
7	Batoe Bahra	30	44.008,08
8	Laboehan Batoe	51	115.729,64
	Total	489	1.064.066,25

Sumber: MvO Gubernur Sumatera Timur; L. Sandick (Arsip Algementee Secretarie GB. TZGAG, No. 8448-ANRI)

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa wilayah yang dibuka untuk dijadikan lahan perkebunan sangat luas. Oleh sebab itu, proses pembukaan perkebunan tidak dilakukan dalam waktu singkat. Proses pembukaan hutan membutuhkan peralatan dan tenaga kerja yang banyak, mengingat luas lahan yang luar biasa dan peralatan yang tidak secanggih zaman sekarang. Kebutuhan tenaga kerja dipenuhi oleh para *ondernemer* dengan mendatangkan tenaga kerja yang diimpor dari berbagai wilayah, terutama Cina dan India. Selain itu mereka juga membutuhkan tenaga hewan, seperti kuda, kerbau, sapi dan gajah. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga hewan, mereka merekrut masyarakat lokal yang memiliki hewan-hewan tersebut. Ini adalah strategi yang mereka pakai untuk mengurangi anggaran. Mereka tidak perlu membayar lebih banyak tenaga kerja karena hewan disediakan alam, dan mereka hanya perlu membayar tenaga manusia yang mengendalikannya (Battistoni, 2017). Dengan cara ini biaya praproduksi bisa ditekan sedemikian rupa, sehingga pemanfaatan tenaga hewan sudah biasa dilakukan oleh para pemilik modal (Barua, 2019).

Pembukaan hutan di Sumatra Timur memanfaatkan gajah untuk membuka hutan-hutan yang sangat sulit dijamah, utamanya wilayah yang berawa atau hutan yang dipenuhi pohon-pohon purba. Pada dasarnya pemanfaatan gajah dapat menekan risiko pekerja perkebunan dari serangan hewan buas seperti harimau, buaya, atau macan yang dianggap menghindari gajah. Di India, gajah juga digunakan ke wilayah yang tidak pernah dijangkau manusia, selain agar lebih aman dari hewan buas. Ketika perkebunan meluas hingga ke pedalaman Sumatra Timur, maka risiko konflik dengan binatang buas seperti harimau tidak akan bisa dielakkan. Berbagai catatan di *Pewarta Deli* dan *Deli Courant* sekitar 1910 – 1925 kerap memberitakan orang-orang yang membawa

ternak atau orang itu sendiri yang disergap oleh macan dan harimau. Terlebih lagi pada wilayah Langkat yang membentang dari pesisir hingga Bukit Barisan.



Gambar 2. Gajah dan pembukaan lahan perkebunan di Langkat 1890

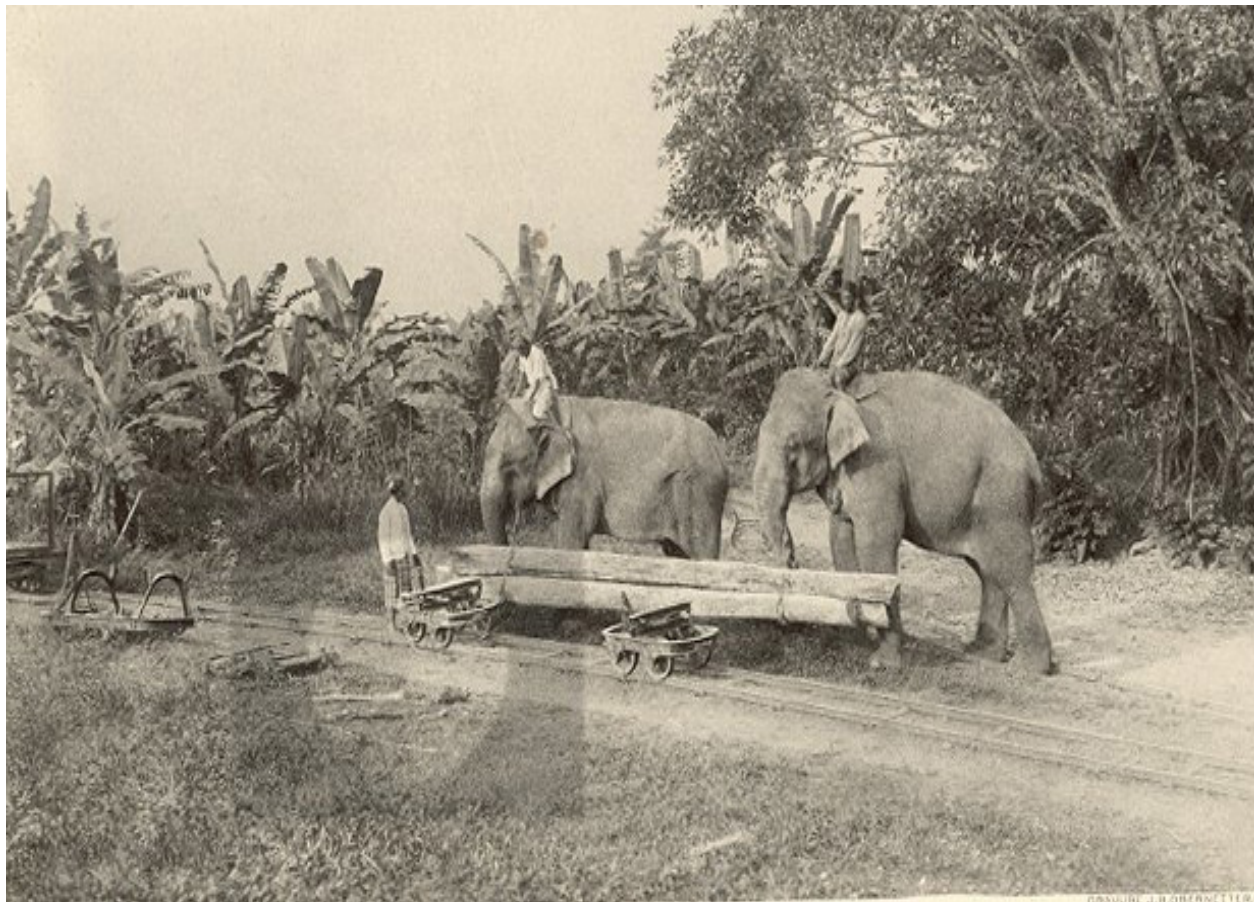
Sumber: Rijksmuseum Amsterdam (RP-F-2003-104-39)



Gambar 3. Gajah dan Pembukaan lahan Perkebunan di Langkat 1890

Sumber: Digital Collection Leiden University (KITLV 116486)

Lahan paling besar yang dibuka di Sumatra Timur berada di Langkat (lihat Tabel 1). Pada 1907, Sultan Langkat (Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah) melakukan perjanjian dengan Kolonial Belanda yang diwakili Jacob Ballot selaku *Residen van Sumatra Oostkust* dalam membentuk wilayah kekuasaan dan terkait dengan konsesi lahan perkebunan. Wilayah tersebut dianggap paling subur di antara kesultanan-kesultanan lain di seluruh Sumatra Timur, namun juga dianggap paling belantara sebab wilayahnya membentang dari pesisir timur hingga Bukit Barisan, khususnya daerah Leuser yang sampai kini menjadi belantara tempat berbagai satwa liar hidup dan dilindungi. Habitat gajah terbesar hingga kini dan menjadi ikon suaka marga satwa berada di Hutan Leuser. Di masa kolonial, pemanfaatan gajah di Langkat cukup signifikan. Gajah tersedia di alam yang bisa dimanfaatkan sebagai alat pembangunan infrastruktur perkebunan. Selain itu, masyarakat Langkat, terutama orang Karo juga terbiasa berinteraksi dengan gajah dan melatihnya untuk kepentingan sehari-hari. Gajah-gajah tersebut sudah didomestikasi demi kepentingan manusia. Hal ini menjadi sangat lumrah karena saat itu gajah lebih baik dalam merintis hutan yang sangat sulit dilalui oleh hewan lain seperti kuda, sapi ataupun kerbau yang memang sudah dilakukan sejak masuknya Islam di wilayah Sumatra Utara (Clarence-Smith, 2004).



Gambar 4. Gajah mengangkut batang pohon dari pembukaan hutan di Lau Boento tahun 1898-1915

Sumber: www.collectienederland.nl

Pembukaan perkebunan tentunya tidak terlepas dari pembangunan jalan sebagai penghubung kantong-kantong perkebunan, baik untuk mobilisasi penduduk, buruh ataupun pengangkutan komoditas perkebunan. Akses jalan adalah salah satu indikator perkembangan perkebunan yang sampai ke pedalaman Sumatra Timur. Jaringan jalan paling awal di Sumatra Timur merupakan jalan-jalan yang dibangun oleh tuan kebun untuk menghubungkan perkebunan dengan perkebunan lain serta dengan perkampungan (Pelzer, 1985). Sebelum adanya jalan, transportasi masih menggunakan sungai, bahkan hingga berdirinya kantor-kantor kolonial di Kota Medan, banyak bangunan yang menghadap ke sungai yang menandakan bahwa sungai adalah jalan utama (Anwar, 2017).

Perusahaan perkebunan dan tuan kebun memiliki peran besar dalam membangun infrastruktur di Sumatra Timur bahkan lebih besar dari pada pemerintah, mengingat hal tersebut berpengaruh pada kepentingan ekonomi. Dalam pembangunan jalan pihak perkebunan tidak hanya melibatkan para buruh perkebunan, namun gajah sebagai salah satu alat utamanya. Karena topografi yang telah telah disebutkan di atas, gajah adalah satu-satunya alat yang sangat membantu dalam mendukung pembangunan jalan tersebut.

Deli Maatschappij memelopori pembangunan jalan sejak tahun 1880-an. Mereka membangun jalan raya antara Medan dan Sunggal sepanjang 10 km, dari Lubuk Pakam ke Bangun Purba sepanjang lebih kurang 20 km (Broersma, 1932). Pada masa ini, pembangunan jalan masih belum melibatkan gajah dalam pembangunannya karena pihak perkebunan masih memanfaatkan kuli perkebunan. Setelah panen tembakau awal sangat berhasil dan diminati Eropa, maka pembukaan perkebunan dilakukan secara besar-besaran pada akhir abad XIX. Pada masa inilah gajah menjadi alat utama dalam pembangunan jalan yang menembus hutan belantara, baik untuk perkebunan ataupun untuk survei wilayah yang memiliki potensi. Tidak ada angka pasti tentang jumlah gajah yang digunakan dalam proses tersebut, namun Nienhuys sebagai pelopor pembukaan perkebunan di Sumatra Timur menjadi salah satu orang Eropa yang menggunakannya dalam membuka hutan dan membangun jalan.

Pembangunan jalan raya kemudian berkembang untuk menghubungkan daerah-daerah penting lainnya. Jalur Medan ke Belawan sepanjang 22 km dibuka. Tidak sampai di situ, jalur-jalur yang lebih panjang juga dibuka seperti Medan ke Pangkalan Brandan melewati Binjai dan Tanjung Pura sepanjang 107 km. Selanjutnya juga dibangun jalan raya dari Lubuk Pakam ke Seribu Dolok sepanjang 92 km, dari Medan ke Kabanjahe 79 km, serta dari Kabanjahe ke Seribu Dolok dan Harang Gaol di tepi Danau Toba. Selain itu juga pembangunan jalan raya dari Kabanjahe ke Kutacane di Aceh, serta dari Parapat ke daerah-daerah di Keresidenan Tapanuli (Broersma, 1932). Tidak bisa diabaikan bahwa peran gajah dalam pembangunan infrastruktur jalan sangat besar. Selain alat transportasi untuk melewati semak belukar, juga sebagai pengangkut bahan pembangunan jalan yang tidak bisa dilakukan oleh pedati ataupun kendaraan mesin. Apalagi transportasi bermesin saat itu belum dimanfaatkan secara meluas dalam kebutuhan manusia.

Deli Maatschappij secara terang-terangan mengklaim memiliki kontribusi besar terhadap pembukaan dan pembangunan kota Medan, yakni pusat ekonomi dan ibu kota Sumatra Timur (*Deli_Maatschappij*, 1919). Proses pembangunan jalan dilakukan setelah pembukaan lahan diselesaikan. Para perkerja jalan yang dipekerjakan oleh para tuan kebun, mengendarai gajah untuk proses meratakan jalan yang digunakan sebagai rute pengangkutan hasil perkebunan.



Gambar 5. Pekerja jalan di Langkat yang menaiki gajah tahun 1925

Sumber: Digital Collection Leiden University (KITLV 180045)

Pemanfaatan gajah dalam proses pembangunan infrastruktur jalan dalam beberapa foto lebih banyak terlihat di wilayah Langkat, hal ini dikarenakan saat itu populasi gajah cukup besar di wilayah tersebut, terutama di kawasan Hutan Leuser yang menjadi habitat hidup gajah Sumatra. Gajah-gajah tersebut memang dilatih untuk kepentingan tertentu, terutama untuk kepentingan ekonomi. Mereka melatihnya sendiri dalam waktu yang cukup lama. Orang Karo dan orang Aceh adalah orang-orang yang paling banyak ditemukan sebagai pawang gajah dan pengendara gajah. Mereka mendomestikasi gajah yang awalnya hidup di kawasan Hutan Leuser (Lim & Campos-Arceiz, 2022).

Di akhir abad XIX, alat transportasi tidak hanya terkait pada jalan raya. Pembangunan kereta api juga dilakukan untuk memudahkan penyortiran hasil perkebunan. *Deli Spoor Maatschappij* (DSM) menginisiasi pembangunan jalur rel kereta api untuk kepentingan mengangkut hasil panen dari perkebunan menuju Pelabuhan (Deli_Maatschappij, 1919). Pada tahun 1902 pembangunan kereta api dilanjutkan dengan menghubungkan antara Lubuk Pakam-Bangun Purba yang digunakan pada tahun 1904. Selanjutnya, tahun 1916 dibangun

jaringan kereta api yang menghubungkan Medan-Siantar yang menjadi pusat perkebunan teh. Pada tahun 1929-1937 turut pula dibangun jaringan kereta api yang menghubungkan Kisaran-Rantau Prapat. Sejak berdirinya sampai tahun 1920-an, *Deli Spoorweg Maatschappij* telah membangun jalur kereta api sepanjang 553 ribu kilometer yang menghubungkan daerah-daerah perkebunan dengan pelabuhan (Weilsfelt, 1972). Dalam pembangunan kereta api ini juga melibatkan gajah untuk mengangkut kayu-kayu bantalan rel. Namun tidak seperti pembangunan jalan, penggunaan gajah kurang signifikan dalam pembangunan rel kereta api, sebab jalur yang dibuka memanjang wilayah pesisir timur Sumatra sejak lama sudah dimanfaatkan oleh pemukiman pribumi.

Tabel 2. Jalur Lintasan dan Panjang Rel Kereta Api DSM tahun 1883-1920

Jalur Lintasan	Panjang Lintasan (km)	Tahun Peresmian
Medan-Labuhan	16.743	25 Juli 1886
Medan-Binjai	20.888	01 Mei 1887
Medan-Delitua	11.249	04 September 1887
Labuhan-Belawan	6.162	16 Februari 1888
Medan-Serdang	20.122	01 Juli 1889
Serdang-Parbaungan	17.668	07 Februari 1890
Binjai-Selesai	10.576	19 Desember 1890
Kp Baru-Arnhemia	14.872	01 Oktober 1907
Pakam-Bangun Purba	27.936	10 April 1904
Selesai-Kuala	9.943	5 November 1902
Bamban-Perbaungan	30.350	11 April 1902
Bamban-Rantau Laban	10.680	02 Maret 1903
Stabat-Rantau Laban	22.428	20 Juni 1903
Stabat-Binjai	24.036	01 Agustus 1904
Tanjung Pura-Brandan	19.505	15 Desember 1904
Delitua-P. Batu	3.035	01 Desember 1915
Brandan-Besitang	14.990	29 Desember 1919
Besitang-P. Susu	9.510	01 Desember 1921
Tebing-Siantar	48.464	05 Mei 1916
Rt. Laban-Tj. Balai	95.602	06 Agustus 1915
Tj. Balai-Tlk. Nibung	4.592	01 Februari 1918
Total Panjang	553. 223	

Sumber: Statistieken Zeven en Deertigste Jaarverslag (DSM, 1929)

B. Perburuan Gajah di Sumatra Timur

Berburu adalah aktifitas yang sudah dilakukan manusia sejak masa praaksara dan terus berlangsung hingga masa kerajaan di Nusantara. Peter Boomgard (1997) menyebutkan bahwa setiap kerajaan yang ada di Nusantara memiliki tempat berburu khusus. Perburuan dilakukan terhadap rusa, burung, harimau, badak, hingga gajah. Berburu juga menjadi aktifitas yang dijadikan hobi bagi sebagian orang Eropa selama berada di wilayah Hindia Belanda, karena hutan-hutan yang ada di Jawa, Kalimantan (Borneo) dan Sumatera memiliki fauna yang sangat beragam (Stroomberg & Apriyono, 2018). Aktivitas perburuan ini terutama terjadi di wilayah perkebunan, termasuk perkebunan di Sumatra Timur. Karena berburu hanya dilakukan sebagai hobi, kegiatan ini dilakukan oleh kalangan terbatas, seperti personel militer, pejabat kehutanan, staf perkebunan, dan turis Amerika dan Inggris yang sengaja datang ke Sumatera Timur untuk berburu di hutan dekat perkebunan (Peter Boomgard, 2001).



Gambar 6. Pemburu gajah di wilayah hutan di perkebunan Deli tahun 1905

Sumber: Digital Collection Leiden University, (KITLV 35784)

Pemburu biasanya mendirikan tenda di dekat perkebunan. Mereka menangkap beberapa spesies yang kelihatan di sekitar daerah tersebut seperti gajah, harimau, dan badak. Perkebunan dimanfaatkan sebagai tempat safari untuk berburu, sedangkan masyarakat lokal Sumatra Timur sendiri jarang sekali berburu untuk kepentingan tersebut. Mereka lebih sering menjebak dan menangkap gajah, harimau, badak atau spesies lainnya untuk dijual atau dikonsumsi (Peter Boomgard, 2001). Di beberapa tempat lain yang bukan wilayah perkebunan, dalam hal ini di wilayah hutan dekat gunung, para pemburu biasanya memakai jasa masyarakat lokal. Mereka pergi berkelompok sebanyak 4-5 orang dan membawa makanan serta perbekalan untuk satu sampai dua bulan, karena untuk membunuh gajah ataupun badak dengan senapan membutuhkan waktu yang lama (*De Sumatra Post*, 15 April 1931).

Perburuan yang dilakukan staf perkebunan Belanda biasanya dilakukan saat waktu senggang mereka. A.C. van der Valk, yang bekerja sebagai penanam untuk sebuah perusahaan karet dan kelapa sawit di Deli selama paruh kedua 1920-an, dia berburu dan menjebak banyak sekali hewan dari beberapa wilayah Sumatra Timur. Dia membawa serta pekerja perkebunan dan personel perusahaan lainnya dalam perjalanan berburu, menjebak, dan menangkap berbagai jenis hewan termasuk gajah, harimau, babi hutan, binturong, siamang, monyet, buaya, ular, kura-kura, orangutan, rangkong dan burung lainnya, dan masih banyak lagi (Valk, 1940). Ia juga mendokumentasikan praktik perburuan adat di antara masyarakat Gayo, Batak, dan Melayu yang sering menemani ekspedisinya di sekitar perkebunan dan ke dalam hutan. Setelah bekerja sebagai penanam selama beberapa tahun, Van der Valk menemukan bahwa dia dapat hidup nyaman dari pendapatan yang diperoleh dari menangkap spesies untuk koleksi manajer perkebunan dan untuk institusi di Belanda (Minarchek, 2018).



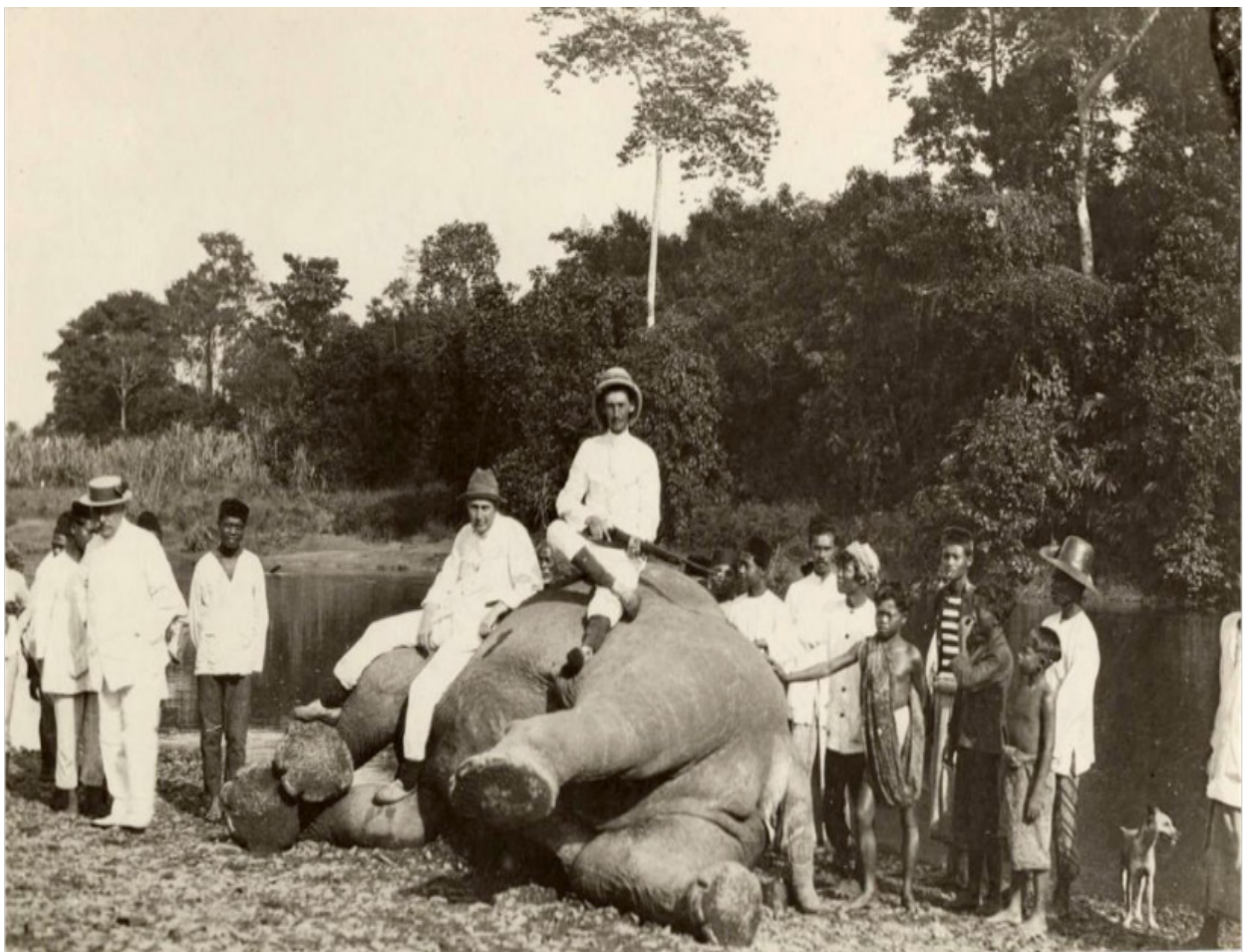
Gambar 7. Perburuan gajah di Simalungun sekitar tahun 1920

Sumber: Digital Collection Leiden University (KITLV 30972)

Ada juga catatan orang asing yang pergi ke Deli khusus untuk berburu binatang buruan di hutan dekat hutan perkebunan, atau mereka yang melakukan perburuan di saat sedang melakukan perjalanan bisnis di Sumatra Timur. Di Deli, para pengunjung yang berburu tersebut dapat menemukan penginapan, porter, dan pemandu untuk memimpin perburuan mereka, juga transportasi mobil dan kereta api untuk menjelajahi daerah tersebut. Hermann Norden, seorang penjelajah dan anggota Royal Geographical Society, membagikan pengalamannya saat melakukan perjalanan ke Sumatra Timur pada tahun 1920 untuk berburu gajah. Ia menyebutkan bahwa para pemilik perkebunan besar di Sumatra Timur sering mempekerjakan pemburu gajah profesional untuk memimpin perburuan dengan pemandu ke dalam hutan. Dia menginap di perkebunan selama berada hari di Deli dan menggambarkan konteks lokal dalam bukunya. Pemilik perkebunan mengirim kuli untuk ikut berburu badak, gajah, juga rusa. Gading gajah dan tanduk rusa biasanya dipajang di rumah para tuan kebun sebagai hiasan. Sementara itu, daging hewan buruan mereka

makan atau dijual ke pasar Cina di Medan. Norden ikut berburu dan berhasil membunuh seekor gajah (Norden, 1923). Dalam narasi yang ia sampaikan, sebenarnya ia lebih tertarik pada kehidupan masyarakat lokal, praktik budaya, dan pengalaman tinggal di perkebunan daripada berburu. Karena setelah menembak binatang, dia meninggalkan tempat itu karena bosan dan kembali ke tempat tinggalnya di perkebunan (Minarchek, 2018).

Kisah perburuan gajah lainnya yang dimuat dalam *De Telegraaf* adalah perburuan yang dilakukan Nijhoff, Sperüing, dan Knuppel. Mereka sengaja datang ke wilayah hutan di Tanjung Selamat, salah satu daerah di Langkat. Mereka berhasil membunuh dua ekor gajah, satu jantan dan satunya lagi betina. Disebutkan pula nama Van der Valk, De Koter, dan Damman yang melakukan perburuan di daerah perbatasan Langkat dan Aceh (*“De Olifantenjacht,”* 1924). Kisah-kisah perburuan seperti itu banyak dijumpai dalam artikel yang ada di *De Sumatra Post* dan *De Telegraaf* sepanjang awal abad XX.



Gambar 8. Pemburu gajah di Batang Serangan tahun 1920

Sumber: Digital Collection Leiden University, (KITLV 35784)

Meskipun perburuan binatang merupakan hal yang lumrah terjadi pada saat itu, terdapat juga penolakan-penolakan terhadap aktivitas tersebut. Protes terhadap perburuan gajah

pertama kali di wilayah Sumatra ditemukan dalam harian *De Soematra Post*. Sebuah artikel yang berjudul “*De Olifantenjacht*” mengulas tentang kegiatan perburuan yang dilakukan oleh para pekerja perkebunan di wilayah perkebunan Serdang di bawah komando Van Der Valk. Mereka menolak pernyataan bahwa mereka membunuh gajah-gajah tersebut untuk kepentingan ekonomi, tapi mereka memburu gajah karena mereka merusak perkebunan milik perusahaan (“*De Olifantenjacht*,” 1908). Meskipun protes tersebut tidak terlalu berarti, namun karena perburuan terus dilakukan dan menyebabkan berkurangnya populasi gajah, maka pemerintah kolonial Belanda akhirnya menaruh perhatian terhadapnya. Terlebih lagi muncul suara para pecinta lingkungan yang berasal dari masyarakat kolonial, khususnya orang kulit putih. Mereka menganggap bahwa perburuan tersebut semestinya sudah ditinggalkan untuk menjaga kelestarian alam Sumatra Timur. Yang menarik adalah suara masyarakat koloni yang menganggap bahwa pembukaan perkebunan sudah cukup merusak alam Sumatra Timur, sehingga tidak perlu lagi menambahkan dengan memburu hewan eksotis yang justru menjadi kekhasan Sumatra Timur itu sendiri (Deli Courant, 1908). Dalam masyarakat lokal sendiri, perburuan juga dikaitkan dengan agama yang berdampak pada permasalahan lingkungan (Rozi & Taufik, 2020).

Merespon keadaan tersebut, pemerintah kolonial mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan dan Perburuan Satwa Liar pada tahun 1924. Ini adalah upaya baru untuk menyelamatkan sejumlah spesies yang terancam punah dan untuk menjaga spesies lain yang ‘berguna’ (khususnya pemakan serangga) agar tidak terancam punah. Undang-Undang tersebut mencantumkan daftar hewan yang harus dilindungi di seluruh wilayah Hindia Belanda tanpa terkecuali. Ada delapan spesies mamalia yang masuk dalam daftar, di antaranya orangutan dan 53 jenis burung. Di wilayah Jawa, perlindungan diberikan kepada badak Jawa dan owa Jawa atau keperakan. Adapun di provinsi luar Jawa, khususnya Sumatra dan Kalimantan, ada 11 spesies atau kelompok hewan tambahan, termasuk di antaranya gajah (Staatsblad, No. 234 Tahun 1924). Undang-undang kedua adalah yang terpenting, secara spesifik disebutkan sebagai Undang-Undang Perburuan. Isinya adalah peraturan tentang perlindungan satwa liar, yang diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya (Staatsblad, No. 133 dan 266 Tahun 1931). Dalam Undang-Undang tersebut terdaftar 22 satwa, spesies atau kelompok spesies yang dilindungi di seluruh wilayah Hindia Belanda dan tujuh satwa atau spesies/kelompok tambahan hanya untuk provinsi di luar Jawa, di antaranya adalah gajah (Boomgaard, 1999).

Terlihat bahwa pemerintah kolonial juga menaruh perhatian dalam persoalan-persoalan hewan langka. Akan tetapi hal ini terlihat ironis, sebab pada saat yang sama pemerintah kolonial justru menutup mata atau bahkan mendorong perluasan perkebunan yang begitu luas sehingga mengganggu ekosistem Sumatra Timur. Tentunya bisa kita lihat apakah perlindungan semacam itu untuk kepentingan kolonial juga dalam menjaga eksotisme alam Sumatra Timur, ataukah sebagai apologi pemerintah kolonial yang telah merusak hutan-hutan purba Sumatra Timur, atau sekadar formalitas dalam menanggapi para

aktivis lingkungan yang menyuarakan perlindungan yang pada dasarnya bukanlah bagian dari perkebunan itu sendiri? Yang jelas bahwa sistem tersebut telah mengawali pokok-pokok perlindungan yang terus berkembang hingga Indonesia merdeka, meskipun pada praktiknya masih belum jelas dengan berbagai kenyataan bahwa masih banyak ditemukan konflik manusia dengan hewan dalam perkebunan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Gajah sebagai sebuah entitas berperan dalam proses pembukaan perkebunan di wilayah Sumatra Timur. Kehadiran mereka tidak mendapat perhatian para peneliti sejarah Sumatra Timur. Kebanyakan dari mereka hanya melihat aspek ekonomi dan sosialnya saja. Gajah juga berperan dalam pembangunan infrastruktur, terutama jalan umum ataupun jalur kereta api, mengingat pada awalnya medan di wilayah Sumatra Timur berupa hutan purba yang dipenuhi pohon besar dan semak belukar sehingga sulit dilalui manusia tanpa bantuan gajah. Mereka adalah alat transportasi yang paling dibutuhkan selain kuda, sapi ataupun kerbau. Hal ini terlihat dalam beberapa foto pada 1890-an dan 1920-an. Meski demikian, pada dekade kedua abad XX aktivitas perburuan terhadap gajah meningkat, sehingga pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-Undang Perburuan pada tahun 1924 dan tahun 1931. Sejak saat itu, gajah menjadi hewan yang dilindungi bahkan hingga saat ini. Namun, yang terlihat di lapangan adalah tetap ada perburuan liar terhadap gajah ataupun konflik terhadap manusia yang bersumber dalam pembukaan perkebunan. Meskipun perlindungan menitikberatkan pada hewan terancam punah, khususnya gajah, seringkali pemenangnya adalah pihak korporat yang menguasai suatu perkebunan di Sumatra ini.

B. Saran

Fakta-fakta yang disajikan dalam tulisan ini hendaknya bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi berbagai pihak dalam menyikapi persoalan hampir punahnya populasi gajah di Sumatra Utara. Upaya yang dilakukan pemerintah kolonial saat itu mungkin sudah diterapkan saat ini, namun pada kenyatannya perburuan liar terhadap gajah di Sumatra Utara masih sering ditemukan. Tidak sedikit kasus gajah yang ditemukan mati tanpa gading di wilayah Langkat, Sumatra Utara. Oleh karena itu, perlu perhatian ekstra bagi pemerintah daerah dan pusat dalam upaya konservasi dan penyelamatan terhadap gajah di Sumatra Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2017). Keruangan Perkotaan Medan dalam Tinjauan Transportasi Perkotaan Masa Kolonial. *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 1(2).
- Barua, M. (2017). Nonhuman labour, encounter value, spectacular accumulation: the geographies of a lively commodity. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 42(2), 274–288. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/tran.12170>
- Barua, M. (2019). Animating capital: Work, commodities, circulation. *Progress in Human Geography*, 43(4), 650–669. <https://doi.org/10.1177/0309132518819057>
- Battistoni, A. (2017). Bringing in the Work of Nature: From Natural Capital to Hybrid Labor. *Political Theory*, 45(1), 5–31. <https://doi.org/10.1177/0090591716638389>
- Boomgaard, P. (1999). Oriental nature, its friends and its enemies: Conservation of nature in late-colonial Indonesia, 1889-1949. *Environment and History*, 5(3), 257–292. <https://doi.org/10.3197/096734099779568245>
- Boomgard, P. (1997). Hunting and Trapping in Indonesian Archipelago, 1500-1950. In P. Boomgard (Ed.), *Paper Landscapes : Explorations in The Environmental History of Indonesia* (pp. 185–213). KITLV Press.
- Boomgard, P. (2001). *Frontiers of Fear: Tigers and People in the Malay World, 1600–1950*. Yale University Press.
- Breman, J. (1997). *Menjinakkan sang kuli: politik kolonial, tuan kebun, dan kuli di Sumatra Timur pada awal abad ke-20*. Hasil kerja sama antara PT Pustaka Utama Grafiti dan Perwakilan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.
- Broersma, R. (1932). *Oostkust van Sumatra: De Ontwikkeling van het Gewest*. Deventer.
- Clarence-Smith, W. G. (2004). Elephants, horses, and the coming of Islam to Northern Sumatra. *Indonesia and the Malay World*, 32(93), 271–284. <https://doi.org/10.1080/1363981042000320161>
- Daliman, A. (2012). *Metode penelitian sejarah*. Penerbit Ombak.
- De Olifantenjacht. (1908). *De Sumatra Post*, 10 April.
- De Olifantenjacht. (1924). *De Telegraaf*, 24 September, 10.
- Deli_Maatschappij. (1919). *Gedenkschrift Bij Gelegenheid Van Het Vijftigjarig Bestaan 1869-1919*.
- DSM. (1929). *Statistieken Zeven en Deertigste Jaarverslag*. NV. Deli Maatschappij.
- Heurn, Jhr. F. C. van. (1929). *De olifanten van Sumatra*. Koninklijke Vereeniging Koloniaal Instituut/Oostkust van Sumatra Instituut.
- Itawan, D. (2020). Dari Hutan Purba Menjadi Perkebunan: Fotografi, Propaganda Kemakmuran, dan Perubahan Lanskap di Sumatera Timur, 1860an-1930an. *Jurnal Sejarah*, 3(2), 28–48. <https://doi.org/10.26639/js.v3i2.266>
-

- Kuswanda, W., Garsetiasih, R., Gunawan, H., Situmorang, R. O. P., Hutapea, F. J., Kwatrina, R. T., Karlina, E., Atmoko, T., Zahrah, M., Takandjandji, M., & Gunaryadi, D. (2022). Can Humans and Elephants Coexist? A Review of the Conflict on Sumatra Island, Indonesia. *Diversity*, 14(6). <https://doi.org/10.3390/d14060420>
- Lim, T., & Campos-Arceiz, A. (2022). A Review of Human-Elephant Ecological Relations in the Malay Peninsula: Adaptations for Coexistence. *Diversity*, 14(1). <https://doi.org/10.3390/d14010036>
- Minarchek, M. (2018). Plantations, Peddlers, and Nature Protection: The Transnational Origins of Indonesia's Orangutan Crisis, 1910 – 1930. *TRaNS: Trans –Regional and –National Studies of Southeast Asia*, 06(01), 1–29. <https://doi.org/10.1017/trn.2017.18>
- Minarchek, M. (2020). Creating environmental subjects: Conservation as counter-insurgency in Aceh, Indonesia, 1925–1940. *Political Geography*, 81(March), 102189. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2020.102189>
- Nienhuys, J. (1903). De Vestiging der Tabakcultuur op Deli. *Indische Mercur*, 30–33.
- Norden, Hermann. (1923). *From Golden Gate to Golden Sun: A Record of Travel, Sport and Observation in Siam and Malaya*. H.F. & G. Witherby.
- Pelzer, Karl. L. (1985). Toeian keboen dan petani Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur, 1863-1947. In *Toeian keboen dan petani Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur, 1863-1947*. Penerbit Sinar Harapan.
- Reid, A. (2011). *Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rozi, S., & Taufik, Z. (2020). Adaptation of Religion and Local Wisdom in Global Environmental Issues in Indonesia. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 4(3), 191–203. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v4i3.9593>
- Stroomberg, J., & Apriyono, H. (2018). *Hindia Belanda 1930*. IRCiSoD.
- Uit den pionierstijd van Deli [From the pioneer time of Deli]. (1938). *De Sumatra Post*, 09 Maret.
- Valk, A. C. van Der. (1940). *Vangen en jagen in Sumatra's wildernis. [Catching and Hunting in Sumatra's Wilderness]*. J.M. Meulenhoff.
- Volker, T. (1928). *Van Oerbosch tot Cultuurgebied: Een Schets van de Beteekenis van de Tabak, de Andere Cultures en de Industrie ter Oostkust van Sumatera*. Deli Planters Vereeniging.
- Weilsfelt, J. (1972). *De Deli Spoorweg Maatschappij als factor in de economische ontwikkeling van de Oostkust van Sumatra*. Bronder-Offset N.V.